

ABSTRAK

PERAN SATGAS PPKPT DALAM PERLINDUNGAN HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (Studi Pada Satgas PPKPT Universitas Lampung)

Oleh

DWI AYU WULANDARI

Kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menunjukkan bahwa ruang akademik yang seharusnya aman dan kondusif bagi sivitas akademika masih memiliki kerentanan serius terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun telah terdapat kerangka regulasi yang mengatur, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi, praktik kekerasan seksual masih terus terjadi di berbagai kampus. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) dalam memberikan perlindungan terhadap hak korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan peran Satgas PPKPT dalam perlindungan hak korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini meliputi anggota Satgas PPKPT Universitas Lampung, akademisi hukum pidana, dan pihak terkait lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menggambarkan peran, mekanisme perlindungan korban, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas Satgas PPKPT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satgas PPKPT Universitas Lampung telah menjalankan peran preventif dan represif dalam perlindungan hak korban kekerasan seksual melalui upaya pencegahan, penerimaan dan penanganan laporan, pendampingan korban, serta pemberian rekomendasi sanksi kepada pihak perguruan tinggi. Perlindungan yang diberikan mencakup aspek hukum, psikologis, sosial, dan akademik guna menjamin pemulihan hak korban. Namun, pelaksanaan

Dwi Ayu Wulandari

peran tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain faktor normatif berupa regulasi yang belum optimal, faktor struktural berupa keterbatasan kewenangan dan sumber daya, serta faktor kultural berupa budaya diam, stigma, dan relasi kuasa yang menghambat korban untuk melapor.

Saran dari penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi internal perguruan tinggi, peningkatan kapasitas dan kewenangan Satgas PPKPT, serta penguatan budaya kampus yang berperspektif kesetaraan gender dan anti-kekerasan. Selain itu, diperlukan sosialisasi berkelanjutan kepada sivitas akademika mengenai mekanisme pelaporan dan perlindungan korban guna menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual.

Kata Kunci: Satgas PPKPT, Perlindungan Korban, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi, Hukum Pidana.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE PPKPT TASK FORCE IN PROTECTING THE RIGHTS OF VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

(A Study of the PPKPT Task Force at the University of Lampung)

By

DWI AYU WULANDARI

The increasing number of sexual violence cases in higher education institutions indicates that academic spaces, which should be safe and conducive for the academic community, still face serious vulnerabilities regarding human rights violations. Although there are regulatory frameworks governing this issue, such as Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes and Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation Number 55 of 2024 concerning the Prevention and Handling of Violence in Higher Education Institutions, sexual violence continues to occur in universities. The problems in this research are: how is the role of the Task Force for the Prevention and Handling of Violence in Higher Education Institutions (Satgas PPKPT) in providing protection for the rights of victims of sexual violence in higher education institutions, and what are the factors that hinder the implementation of the Satgas PPKPT's role in protecting victims' rights.

The research method used in this study is a juridical-empirical and juridical-normative approach. The data used consist of primary and secondary data. The informants in this research include members of the Satgas PPKPT of Universitas Lampung, criminal law academics, and other relevant stakeholders. Data analysis was conducted using qualitative analysis to describe the role, victim protection mechanisms, and factors influencing the effectiveness of the Satgas PPKPT's duties.

The results of this research indicate that the Satgas PPKPT of Universitas Lampung has carried out preventive and repressive roles in protecting the rights of victims of sexual violence through prevention efforts, receiving and handling reports, victim assistance, and providing recommendations for sanctions to the university authorities. The protection provided covers legal, psychological, social, and academic aspects to ensure the restoration of victims' rights. However, the

Dwi Ayu Wulandari

implementation of these roles still faces several obstacles, including normative factors such as suboptimal regulations, structural factors such as limited authority and resources, and cultural factors such as silence culture, stigma, and power relations that hinder victims from reporting.

The recommendations of this research are the strengthening of internal university regulations, enhancement of the capacity and authority of the Satgas PPKPT, and the development of a campus culture based on gender equality and anti-violence principles. In addition, continuous socialization to the academic community regarding reporting mechanisms and victim protection is necessary to create a safe, inclusive, and violence-free higher education environment.

Keywords: Satgas PPKPT, Victim Protection, Sexual Violence, Higher Education, Criminal Law.